

TESIS

**ANALISIS HUBUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

***ANALYSIS RELATIONSHIP HUMAN DEVELOPMENT INDEX AND
REGIONAL DEVELOPMENT IN THE WEST SULAWESI PROVINCE***

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD HAEKAL ANSYAR

P022191010



**MAGISTER PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH
OTONOMI DAERAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

**ANALISIS HUBUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

*ANALYSIS RELATIONSHIP HUMAN DEVELOPMENT INDEX AND
REGIONAL DEVELOPMENT IN THE WEST SULAWESI PROVINCE*

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah / Otonomi Daerah

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD HAEKAL ANSYAR

Kepada

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS HUBUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD HAEKAL ANSYAR

P022191010

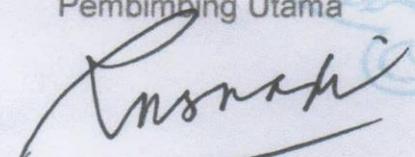
Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang
dibentuk dalam rangka penyelesaian program studi
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah
Pascasarjana Universitas Hasanuddin

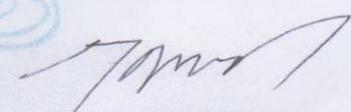
pada tanggal 26 November 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

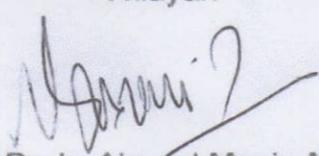
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Ir. Rusnadi Padjung, M.Sc
NIP.19600222 198503 1 002


Prof. Dr. Ir. Muslim Salam, M.Ec
NIP.19680616 199203 1 002

Ketua Program Studi.
Perencanaan dan Pengembangan
Wilayah


Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng
NIP.19620727 198903 1 003

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc
NIP.19670308 199003 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Haekal Ansyar**

Nomor Mahasiswa : P022191010

Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah / OTODA

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Analisis Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Januari 2022

Yang menyatakan,



MUHAMMAD HAEKAL ANSYAR

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi 'Alamin. Segala puji bagi Allah Subhana Wa Ta'ala, Tuhan Semesta Alam berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa pula penulis selalu mengirimkan Salam dan Shalawat kepada junjungan Umat Islam Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam.

Hal yang melatarbelakangi penulisan tesis ini yaitu sebagai kajian untuk menganalisis Indeks Pembangunan Manusia dan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2019. Maksud dari penulisan tesis ini untuk menjadi bahan evaluasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten.

Seiring berjalannya waktu, proses penelitian ini tentu saja mengalami banyak kendala baik itu pada pengambilan data, proses analisis tapi atas berkat Rahmat Allah dan bantuan dari dewan pembimbing yang diketuai Dr. Ir. Rusnadi Padjung, M.Sc dan Prof. Dr. Ir. Muslim Salam, M.Ec, sebagai anggota akhirnya tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan target yang diinginkan penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih atas motivasi dan do'a kepada kedua orang tua penulis Bapak Drs. Ansyar Adam, S.Sos., M.Pd dan Ibu Siti Fatimah Katili dan kepada isteri penulis Nurul Fadhilah, S.Pd., M.Pd, serta anakku Muhammad Ukkasyah Shalih Haekal, kepada kedua mertua Bapak Drs.H. Abdul Rasyid, ST dan Ibu Hj. Subaedah yang juga

telah banyak membantu serta kepada saudara-saudara penulis:
Muhammad Syarif Ansyar, SE, Siti Aisyah Ansyar, S.Ag.

Terima kasih juga kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang memberikan kami kesempatan beasiswa untuk dapat melanjutkan ke jenjang magister di Universitas Hasanuddin dalam hal ini Gubernur Sulawesi Barat Bapak Drs. H. Ali Baal Masdar, M.Si. tidak lupa juga penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Bapak Dr. Muhammad Idris DP yang turut banyak membantu dalam penyelesaian studi penulis. Begitu pula ucapan terima kasih kepada Kepala BKD Provinsi Sulawesi Barat Bapak H. Zulkifli Manggazali, SE., M,Si serta kepada Bapak Hisyam Said, S.Sos Kabid Formasi dan Pengadaan Pegawai

Tesis ini tentu saja tidaklah sempurna masih banyak kekurangan didalamnya namun penulis berharap tesis ini menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi peneliti selanjutnya dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta Kabupatennya.

Makassar, Oktober 2021

Muhammad Haekal Ansyar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan indeks pembangunan manusia dan pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan analisis data panel yang menggabungkan data time series-cross section dan menggunakan metode Two Stage Least Square (2SLS). Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat. Variabel dari indeks pembangunan manusia yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan indeks daya beli. Sedangkan variabel dari pembangunan wilayah yaitu kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah serta PDRB. Hasil analisis dengan menggunakan metode 2SLS. Pada persamaan IPM variabel PW secara parsial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap IPM untuk $\alpha=5\%$. Namun jika untuk $\alpha=20\%$ PW berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan pada persamaan PW variabel IPM secara parsial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PW untuk $\alpha=5\%$. Adapun R^2 pada persamaan IPM sebesar 97,5% dan sisanya 2,5% yang menunjukkan bahwa pengaruh PW, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Indeks Daya Beli secara bersama-sama berpengaruh terhadap IPM. Sedangkan pada persamaan PW determinasi R^2 sebesar 99,2% dan sisanya yaitu 0,8% yang menunjukkan IPM, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Ketimpangan Wilayah dan Produk Domestik Regional Bruto secara bersama-sama berpengaruh terhadap PW. Jadi, terdapat

hubungan yang simultan antara Indeks Pembangunan Manusia dan Pembangunan Wilayah.

Kata Kunci: indeks pembangunan manusia, pembangunan wilayah, metode Two Stage Least Square (2sls).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Indeks Pembangunan Manusia	12
1. Pengukuran Pembangunan Manusia	16
2. Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia.....	17
a) Indeks Kesehatan.....	17
b) Indeks Pendidikan.....	19
c) Indeks Daya Beli	20
B. Pembangunan Wilayah.....	22
1. Indikator Pembangunan Wilayah	24
a) Pertumbuhan Ekonomi.....	24
b) Tingkat Kemiskinan.....	26
c) Tingkat Pengangguran.....	27

d) Produk Domestik Regional Bruto.....	29
e) Ketimpangan Wilayah	30
C. Penelitian Terdahulu	31
D. Kerangka Pikir.....	34
E. Hipotesis Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Rancangan Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data	37
D. Persamaan Simultan.....	38
1. Metode Estimasi	38
E. Teknik Analisis Data dan Variabel Penelitian.....	39
1. Model Persamaan Indeks Pembangunan Manusia	39
2. Model Persamaan Pembangunan Wilayah.....	40
F. Definisi Operasional	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil	44
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
2. Statistik Deskriptif.....	46
3. Estimasi Model.....	50
4. Pemilihan Model.....	54
5. Uji Asumsi Klasik.....	57
6. Model Persamaan	61
7. Uji Hipotesis	65

B. Pembahasan	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2010-2019.....	2
Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat Menurut Kabupaten Tahun 2010-2019	3
Tabel 1.3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat... Tahun 2010-2019	5
Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Provinsi Sulawesi Barat.....	7
Tabel 1.5 PDRB Per Kapita Berdasarkan Harga Konstan (Juta Rupiah).....	14
Tabel 2.1 Batas Maksimum dan Minimum	17
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2019 Provinsi Sulawesi Barat.....	46
Tabel 4.2 Uji Statistik Deskriptif Tiap Variabel	47
Tabel 4.3 CEM Persamaan IPM	51
Tabel 4.4 FEM Persamaan IPM	51
Tabel 4.5 REM Persamaan IPM	52
Tabel 4.6 CEM Persamaan Pembangunan Wilayah.....	53
Tabel 4.7 FEM Persamaan Pembangunan Wilayah	53
Tabel 4.8 REM Persamaan Pembangunan Wilayah	54
Tabel 4.9 Hasil Uji Chow Persamaan IPM	55
Tabel 4.10 Hasil Uji Hausman Persamaan IPM	55
Tabel 4.11 Hasil Uji Chow Persamaan Pembangunan Wilayah	56
Tabel 4.12 Hasil Uji Lagrange Multiplier Persamaan Pembangunan Wilayah ..	56
Tabel 4.13 Uji Multikolinearitas Persamaan IPM	58
Tabel 4.14 Uji Autokorelasi Persamaan IPM.....	58

Tabel 4.15 Uji Heterokedastisitas Persamaan IPM.....	59
Tabel 4.16 Uji Multikolinearitas Persamaan Pembangunan Wilayah	60
Tabel 4.17 Uji Autokorelasi Persamaan Pembangunan Wilayah	60
Tabel 4.18 Uji Heterokedastisitas Persamaan IPM.....	61
Tabel 4.19 Koefisien Regresi Persamaan IPM	61
Tabel 4.20 Koefisien Regresi Persamaan Pembangunan Wilayah	63
Tabel 4.21 Uji t Persamaan IPM.....	65
Tabel 4.22 Uji t Persamaan Pembangunan Wilayah	67
Tabel 4.23 Uji F Persamaan IPM.....	69
Tabel 4.24 Uji F Persamaan Pembangunan Wilayah	69
Tabel 4.25 Uji F Persamaan IPM.....	70
Tabel 4.26 Uji F Persamaan Pembangunan Wilayah	70
Tabel 4.27 Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Barat.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Tematik IPM Sulawesi Barat.....	7
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.....	35
Gambar 4.1 Peta Provinsi Sulawesi Barat	45
Gambar 4.2 Peta Tematik IPM Indonesia 2019	49
Gambar 4.3 Uji Normalitas Persamaan IPM	57
Gambar 4.4 Uji Normalitas Persamaan Pembangunan Wilayah.....	59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2019	72
Grafik 4.2 Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Total PDRB Tahun 2015-2019	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Negara belum bisa dikatakan berhasil apabila dilihat dari besarnya pendapatan domestik bruto tanpa adanya peningkatan dari pembangunan manusia. Banyak cara dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia salah satu cara dengan menggunakan indeks pembangunan manusia atau *human development index*.

Salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yaitu indeks pembangunan manusia dilihat dari 3 (tiga) dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli (Irmayanti, 2017). Indeks pembangunan manusia merupakan alat ukur gabungan yang terpengaruh seperti indikator kesehatan yang mewakili angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang mewakili indikator pendidikan dan indikator ekonomi berdasarkan daya beli masyarakat (Kirana et al., 2018). Indeks pembangunan manusia diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan serta ekonomi yang dilihat dari berapa besar daya masyarakat (Pratiwi, 2019).

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2010-2019

Tahun	Indeks Kesehatan/Angka Harapan Hidup	Rata-rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Indeks Daya Beli
2010	69,81	7,46	11,29	9.437
2011	70,01	7,52	11,44	9.647
2012	70,20	7,59	11,68	9.815
2013	70,40	7,61	12,10	9.858
2014	70,59	7,73	12,39	9.903
2015	70,78	7,84	12,55	10.150
2016	70,90	7,95	12,72	10.420
2017	71,06	8,10	12,85	10.664
2018	71,20	8,17	12,91	11.059
2019	71,34	8,34	12,95	11.299

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pembangunan manusia di Indonesia tidak merata yang diukur oleh IPM. Ada beberapa indikator yang mencerminkan kualitas modal manusia yaitu tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat (Ezkirianto & Alexandi, 2013). Indeks pembangunan manusia di Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata sekitar (0,89 persen). Dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah pada 2019 bayi yang baru lahir memiliki angka harapan hidup hingga (71,34 tahun). Umur harapan hidup juga meningkat, air minum bersih meningkat, persentase rumah yang tidak memiliki fasilitas jamban menurun dan makin mengecilnya perkawinan dini (Herman, 2020). Selama periode 2010-2019, angka harapan hidup Indonesia meningkat sebesar (1,39 tahun) atau setara dengan (0,25 persen) per tahun (Humas, 2019).

Pada 2010 usia angka harapan hidup saat lahir di Indonesia sebesar (69,81 tahun) dan di tahun 2019 mencapai (71,34 tahun).

Sementara dimensi pengetahuan pada IPM yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas, kedua indikator tersebut mengalami peningkatan tiap tahunnya. Selama periode 2010-2019. Di Indonesia harapan lama sekolah meningkat (1,62 tahun), sedangkan rata-rata lama sekolah bertambah (0,71 tahun). Meningkatnya harapan lama sekolah pertanda bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2019 harapan lama sekolah Indonesia mencapai (12,95) yang berarti anak usia 7 tahun ada peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA atau D1. Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang di presentasikan oleh pengeluaran per kapita (harga konstan). Pada 2019 pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia mencapai Rp11,2 juta per tahun sedangkan di tahun 2010 hanya Rp9,4 juta per tahun.

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat Menurut Kabupaten Tahun 2010 - 2019

Kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mamuju	61,65	62,28	63,24	64,17	64,71	65,09	65,65	66,32	67,11	67,72
Majene	61,67	62,56	63,06	63,32	63,74	64,40	64,80	65,40	66,01	66,59
Poi-Man	57,44	58,26	58,62	59,27	60,09	60,87	61,51	62,35	63,14	63,74
Pasangkayu	61,29	62,23	63,00	63,76	64,04	64,69	65,17	65,67	66,60	67,27
Mamasa	60,88	61,45	61,95	62,57	62,85	63,17	63,51	63,92	64,66	65,32
Sul-Bar	59,74	60,63	61,01	61,53	62,24	62,96	63,60	64,30	65,10	65,73

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan data BPS Indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Barat masih dikategorikan rendah karena masih berada di

peringkat 31 secara nasional dengan angka di tahun 2019 sebesar 65.73 (dapat dilihat pada tabel 1.2). Angka tersebut akumulasi dari 6 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu.

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Barat beserta 6 Kabupaten yang ada menunjukkan perkembangan dan peningkatan yang tiap tahunnya cenderung naik pada tahun 2010-2019. Indeks pembangunan manusia Sulawesi Barat di tingkat nasional mengalami peningkatan selama periode 2017-2018. Tercatat ada 3 (tiga) Provinsi yang paling cepat kemajuan pembangunannya yaitu, Provinsi Papua (1,64 persen), Provinsi Sulawesi Barat (1,24 persen), dan Provinsi Papua Barat (1,19 persen). Kemajuan dari Provinsi Papua didorong oleh dimensi pendidikan, di Papua Barat didorong oleh dimensi standar hidup layak, sementara di Sulawesi Barat didorong oleh perbaikan dimensi pendidikan dan standar hidup layak. Kendala yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten yang ada di wilayahnya yaitu masih rendahnya indeks pembangunan manusia.

Tabel 1.3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2019

Tahun	Indeks Kesehatan/Angka Harapan Hidup	Rata-rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Indeks Daya Beli
2010	62.50	6.63	10.58	8.003
2011	62.78	6.65	11.21	8.049
2012	63.04	6.76	11.28	8.091
2013	63.32	6.87	11.46	8.148
2014	64.04	6.88	11.78	8.170
2015	64.22	6.94	12.22	8.260
2016	64.31	7.14	12.34	8.450
2017	64.34	7.31	12.48	8.736
2018	64.58	7.50	12.59	8.243
2019	64.82	7.73	12.62	9.235

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Pada tabel 1.3 diatas terdapat indeks kesehatan yang diperoleh dari angka harapan hidup seseorang sejak dilahirkan. Tabel diatas merupakan komponen indeks pembangunan manusia dari Provinsi Sulawesi Barat yang berasal dari gabungan Kabupaten. Angka harapan hidup Provinsi Sulawesi Barat selama kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2019 semakin meningkat. Pada tahun 2010 tercatat indeks kesehatan (62,50 tahun) dan meningkat 0,39% menjadi (64,82 tahun) pada tahun 2019.

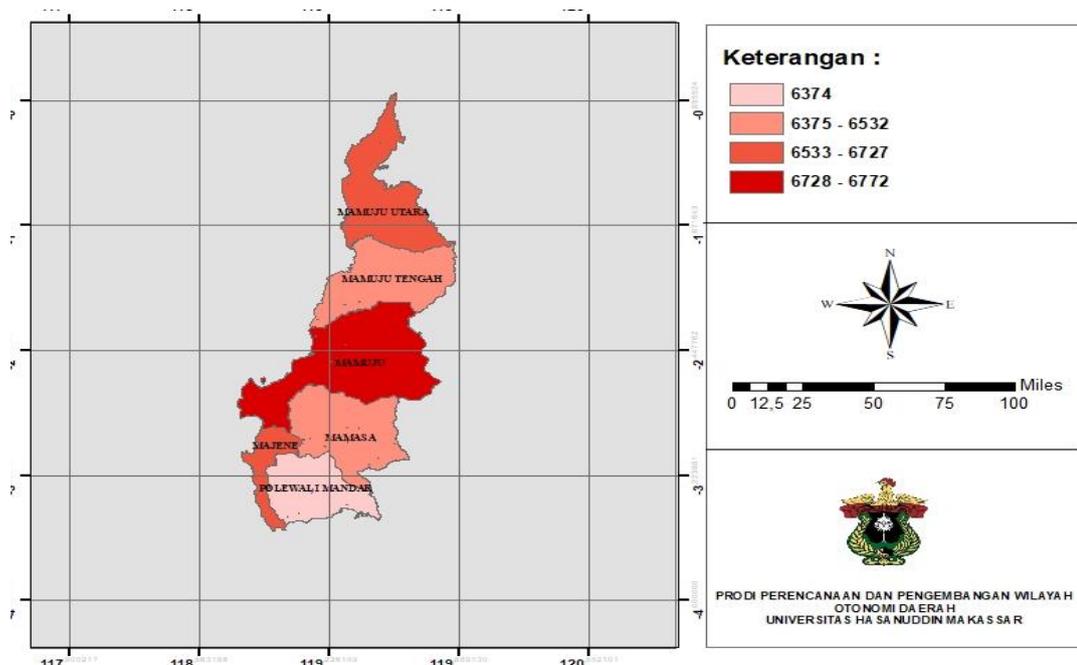
Adapun angka harapan hidup yang terendah yaitu berada di Kabupaten Majene, tercatat di tahun 2010 hanya mencapai (59,82 tahun) dan mengalami peningkatan tahun 2019 mencapai (61,30 tahun). Adapun angka rata-rata lama sekolah Sulawesi Barat dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 sebesar (6,63 tahun) dan pada tahun 2019 meningkat sebesar (7,73 tahun). Sedangkan angka rata-rata lama sekolah yang terendah berada di Kabupaten Polewali Mandar di tahun 2010 hanya (6,41 tahun), selama 10 tahun terakhir mengalami

peningkatan di tahun 2019 (7,40 tahun). Angka rata-rata lama sekolah yang tertinggi terdapat di Kabupaten Pasangkayu, tahun 2010 mencapai (6,90 tahun) dan 2019 mencapai (7,92 tahun). Angka tersebut telah berada diatas Kabupaten Mamuju selaku Ibu kota Provinsi.

Harapan lama sekolah dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 sebesar (10,58%) dan pada tahun 2019 mencapai (12,62%). Angka harapan lama sekolah merupakan gabungan dari harapan lama sekolah di tiap kabupaten di Sulawesi Barat. Kabupaten Pasangkayu merupakan kabupaten yang memiliki angka harapan lama sekolah terendah di tahun 2010 angka harapan lama sekolah (10,55%) sampai di tahun 2019 mencapai (11,66%). Sedangkan Kabupaten yang angka harapan lama sekolah yang tertinggi berada di Kabupaten Majene sangat jauh dari Kabupaten Pasangkayu tahun 2010 (11,68%) hingga tahun 2019 mencapai (13,60%).

Pengeluaran per kapita memberikan gambar tingkat daya beli (*Purchasing Power Parity*) masyarakat, dan sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah. Besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun pendapatan yang akurat susah diperoleh, sehingga dalam susenas data didekati melalui data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran makanan dan non makanan yang menggambarkan

bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. pada tabel 1.3 diatas menunjukkan pengeluaran per kapita disesuaikan sebesar (Rp.8,003) pada tahun 2010 dan meningkat tiap tahunnya hingga 2019 mencapai (Rp.9,235). Berikut adalah peta sebaran IPM di Sulawesi Barat tahun 2019:



Gambar 1.1 Peta Tematik IPM Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Provinsi Sulawesi Barat

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Persentase)	Tingkat Kemiskinan (Persentase)	Tingkat Ketimpangan Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persentase)
2010	10.73	13.58	-	3.25
2011	11.23	13.64	0,320	2.82
2012	9.25	13.01	0,335	2.14
2013	6.94	12.23	0,342	2.33
2014	8.86	12.05	0,375	2.08
2015	7.31	11.90	0,376	3.35
2016	6.01	11.19	0,361	-
2017	6.39	11.30	0,359	3.21
2018	6.25	11.25	0,355	3.16
2019	5.66	11.02	0,365	3.18

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov Sulawesi Barat

Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi: pengurangan angka kemiskinan, penanggulangan ketimpangan wilayah, serta mengurangi tingkat pengangguran dan peningkatan PDRB. Kinerja perekonomian Sulawesi Barat tahun 2010-2014 cenderung mengalami penurunan (tabel 1.4). Pada tahun 2011-2013 pertumbuhan ekonomi menurun dari (10,73 %) menjadi (6,94%) pada tahun 2013, kemudian meningkat lagi menjadi (8,73%) pada tahun 2014. Selama kurun waktu tersebut pertumbuhan rata-rata Sulawesi Barat sebesar (8,91%), berada di atas rata-rata nasional (5,9%).

Faktor lain yang mempengaruhi pembangunan wilayah adalah tingkat kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2010 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi, pada (tabel 1.4) angka kemiskinan dari tahun 2010-2015 mengalami penurunan akan tetapi di tahun 2016-2017 persentasenya meningkat dari (11,19%) menjadi (11,30%). Pencapaian itu sebuah hal positif namun masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 10,12 persen. Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Polewali Mandar sebesar 15,60 persen dan terendah berada di Kabupaten Pasangkayu 4,28 persen di tahun 2019. Rendahnya tingkat kemiskinan di Pasangkayu tidak sejalan dengan indeks pembangunan manusia yang di tahun 2019 mencapai 67,27 persen.

Di dalam tabel 1.4 pada indikator tingkat pengangguran terbuka hanya menjelaskan persentase jumlah pengangguran secara keseluruhan

terhadap jumlah angkatan kerja laki-laki maupun perempuan. Penjelasan mengenai pengangguran laki-laki dan perempuan tidak tercantum karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan perempuan yang 15 tahun keatas dikategorikan sebagai penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja karena masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan selain kegiatan pribadi.

Adapun istilah gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek sosial budaya dan gender ini tidak melihat jenis biologis secara equality dan tidak menjadikan sebagai alat pendiskriminasian salah satu pihak karena bersifat biologis dalam perimbangannya (Syamsiah, 2014). Berdasarkan hal tersebut, gender terbagi menjadi dua pengertian. Pertama diartikan sebagai “seks atau jenis kelamin” yang lebih umumnya dikenal “jenis kelamin secara kodrati”. Kedua diartikan sebagai “jenis kelamin” secara kultural dan psikologis. Dari pengertian kedua ini yang dimaksud dengan gender. Gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya.

Sulawesi Barat saat ini masih bergantung pada sektor yang mengandalkan sumber daya alam, seperti: perkebunan, pertanian,

kehutanan dan perikanan. Data BPS tahun 2019 sektor tersebut mempekerjakan (323.280 orang) yang merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Sulawesi Barat. Adapun sektor jasa yang mempekerjakan (205.574 orang). Sedangkan tenaga kerja yang paling rendah berada di sektor industri sejumlah (90.541 orang). Adapun pendapatan domestik regional bruto (PDRB) yang perannya menjadi salah satu indikator utama dalam pembangunan wilayah di bidang perekonomian. PDRB Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan peningkatan dari tiap tahunnya dari 2010 – 2019 (11,23 s/d 5,66).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia serta pembangunan wilayah.
2. Seberapa besar hubungan antara indeks pembangunan manusia dengan pembangunan wilayah.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan manusia dan pembangunan wilayah.

2. Menganalisis hubungan keterkaitan indeks pembangunan manusia dengan pembangunan wilayah

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam penerapan di daerah. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat yaitu dijadikan pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan wilayah serta mampu mewujudkan 17 tujuan sustainable development goals (pembangunan berkelanjutan) di Sulawesi Barat. Dan hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan empirik mengenai ilmu perencanaan pengembangan wilayah.

2. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penelitian indeks pembangunan manusia dan pembangunan wilayah.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pembangunan wilayah menurut indikatornya terdiri dari

(pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan PDRB harga konstan Provinsi Sulawesi Barat) yang dilihat dari indeks pembangunan manusia di tahun 2010-2019 Provinsi Sulawesi Barat menurut indikatornya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Indeks Pembangunan Manusia

Beberapa ahli berpendapat bahwa pembangunan adalah dapat mensejahterakan bagi semua warga negara dari segi manusianya yang menjadi fokus utama. Pembangunan tidak semata-mata pembangunan dalam bentuk fisik dan infrastruktur melainkan harus melibatkan subjek dan objeknya yaitu manusia (Heriyanto, 2015). Tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan rakyat, pembangunan di daerah menjadikan manusia menjadi subyek bukan hanya objek sehingga memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi suatu wilayah (Yuliani & Saragih, 2014)

Pembangunan merupakan alat yang digunakan mencapai tujuan bangsa, salah satunya terdapat di dalam UUD 1945 diantaranya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara umum, makna tentang pembangunan adalah suatu proses perencanaan (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara ini yang disebut konseptualisasi pembangunan (Kartono & Nurcholis, 2016).

Dalam konsep pembangunan manusia, seharusnya pembangunan dianalisis dari sudut manusianya bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya saja (Irmayanti, 2017), adapun sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian;
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan untuk penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya aspek ekonomi saja.
3. Pembangunan manusia memfokuskan perhatiannya bukan hanya meningkatkan kapabilitas manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia secara optimal.
4. Empat pilar pokok yang mendukung pembangunan manusia: produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Indeks pembangunan manusia adalah indeks komprehensif, yang digunakan sebagai penilaian kuantitatif dasar atas modal manusia dan mencirikan tingkat perkembangan manusia di negara dan wilayah negara

ini. Indeks ini merupakan dasar dalam hal kesehatan dan umur panjang, pendidikan dan pendapatan aktual penduduknya (Todaro & Smith, 2010).

Menurut (Ranis et al., 2000) indeks pembangunan manusia dianalisis dalam 3 (tiga) bidang utama:

1. Indeks harapan hidup adalah indikator utama harapan hidup rata-rata di dunia. Selain itu, indeks ini mengukur kesehatan dan umur panjang warga negara tertentu.
2. Indeks pendidikan yang mencakup akses pendidikan, yang diukur dari rata-rata harapan hidup anak usia sekolah dan rata-rata usia sekolah orang dewasa.
3. Indeks pendapatan nasional bruto, yang merupakan metode utama untuk menilai tingkat kehidupan (kualitas hidup), diukur berdasarkan nilai pendapatan nasional bruto.

Indeks pembangunan manusia ditujukan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, maka untuk mengetahui dampak sebagai komponen dasar penghitungan digunakanlah angka harapan hidup ketika lahir, pencapaian pendidikan dapat diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah serta pengeluaran konsumsi. Ada nilai sasaran bagi suatu daerah yang menunjukkan daerah tersebut memiliki nilai IPM tinggi atau rendah, yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali, serta tingkat konsumsi dan pengeluaran yang telah mencapai standar hidup layak dapat dilihat pada (Tabel 2.1) dibawah.

1. Pengukuran Pembangunan Manusia

Indikator komposit pembangunan manusia adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat pencapaian pembangunan manusia antar wilayah dan antar waktu. Indeks pembangunan manusia adalah alat ukur yang dapat mewujudkan pembangunan manusia dalam capaian persentase dengan memperhatikan 3 (tiga) faktor yaitu kelangsungan hidup, pengetahuan, dan daya beli.

Skor indeks pembangunan manusia berkisar 0 sampai dengan 1. Semakin dekat dengan angka 1 maka nilai IPM akan tinggi dan SDM suatu negara/daerah akan berkualitas. Demikian pula sebaliknya, UNDP mengelompokkan indeks pembangunan manusia menjadi 4 kategori, yaitu:

- a. Very High HDI : nilai IPM 80
- b. High HDI : nilai IPM 70-79
- c. Medium HDI : nilai IPM 60-79
- d. Low HDI : nilai IPM 50

Pembangunan manusia menurut standar United Nations Development Program (UNDP), terdiri dari 4 kriteria yakni IPM > 80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi, IPM 60-79 kategori sedang, IPM < 60 kategori rendah. Indeks pembangunan manusia Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya sekitar 0,89 persen. Dari kategori sedang pada tahun 2014, indeks pembangunan manusia Indonesia menjadi kategori tinggi pada tahun 2019 yaitu 71,92 persen. Adapun nilai indeks

pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 mencapai 65,73 yaitu masuk dalam kategori sedang.

Untuk menghitung masing-masing komponen indeks pembangunan manusia digunakan batas maksimum dan minimum, dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.1
Batas Maksimum dan Minimum

No.	Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
2	Harapan Lama Sekolah (Persen)	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
4	Daya Beli (Rupiah PPP)	732.720	300.000	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

Sumber: UNDP, Human Development Report 1993 (dalam Irmayanti:2017). Catatan: (a) proyeksi pengeluaran riil/unit/tahun untuk Provinsi yang memiliki angka tertinggi (Jakarta) pada tahun 2018 setelah disesuaikan dengan formula atkinson. Proyeksi mengaumsikan kenaikan 6,5 persen per tahun selama kurun 1996-2018. (b) setara dengan dua kali garis kemiskinan untuk Provinsi yang memiliki angka terendah 1996 Papua.

2. Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia

Menurut The United Nations Development Programme (UNDP) dalam laporan pembangunan manusia setiap tahunnya sejak 1996 telah menerbitkan indeks pembangunan manusia yang terdiri dari:

a) Indeks Kesehatan

Angka harapan hidup (AHH) dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kesehatan individu di daerah tersebut. Angka harapan hidup (AHH) merupakan tingkat usia rata-rata yang dicapai penduduk dalam

periode waktu tertentu. Semakin baik perekonomian dan kesehatan di suatu negara maka semakin baik pula angka harapan hidup masyarakat (Irmayanti, 2017).

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu wilayah dan dikatakan maju apabila angka yang mencakup harapan hidup seseorang baik karena berkaitan dengan kesehatan manusianya. Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya untuk memperluas kesempatan masyarakat untuk mencapai hidup layak yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada level ini pentingnya meningkatkan kapasitas dasar adalah salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan (Widodo et al., 2012).

Cara menghitung angka harapan hidup (AHH) dengan pendekatan tak langsung. Dalam perhitungan ada 2 (dua) jenis data yang digunakan yaitu Angka Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sedangkan untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum yang telah ditentukan oleh standar UNDP seperti yang terdapat pada (tabel 2.1) dimana angka tertinggi sebagai batas untuk penghitungan adalah 85 tahun dan terendah 25 tahun.

Secara umum derajat kesehatan penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari rata-rata lama hidup yang akan dicapai pada bayi yang baru lahir. Hasil dari indikator komposit yang berkaitan dengan usia harapan hidup ternyata angkanya menunjukkan hasil pembangunan kesehatan

masyarakat yang berhubungan langsung dengan peningkatan usia harapan hidup suatu daerah.

b) Indeks Pendidikan

Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah dan menjadi indikator utama untuk mengukur derajat pendidikan yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia (Irmayanti, 2017). Suatu negara dikatakan maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto tetapi mencakup aspek harapan hidup dan pendidikan masyarakatnya (Widodo et al., 2012).

Harapan lama sekolah (HLS) diartikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. Asumsi yang beredar bahwa seorang anak akan tetap bersekolah di umur selanjutnya dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang saat ini. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas. Dan harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Rata-rata lama sekolah menandakan makin tinggi pendidikan yang di raih oleh masyarakat di suatu daerah. Tingginya tingkat pendidikan yang dijalani berarti semakin tinggi rata-rata lama sekolah. Sedangkan anggapan di kalangan masyarakat memiliki pendidikan tinggi berarti kualitas yang dimiliki seseorang makin baik pula baik itu pola pikir maupun tindakannya.

Tobing (Yunita, 2012) mengemukakan orang yang pendidikannya lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang baik daripada orang yang pendidikannya rendah.

Pembangunan pendidikan digunakan sebagai proses kehidupan sistem sosial yang dampaknya dapat menjadi unggul dan lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan Inkeles dan Smith bahwa manusia bisa diubah secara mendasar setelah tumbuh menjadi dewasa, karena itu tidak ada manusia yang terus menjadi manusia tradisional dalam pandangan dan kepribadiannya hanya karena mereka dibesarkan dalam sebuah masyarakat tradisional (Agung, 2010).

Pendidikan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah. Konsep pembangunan dalam bidang sosial ekonomi sangat beragam tergantung konteks penggunaannya. Teori pembangunan yang didasari pada kapasitas produksi tenaga manusia di dalam proses pembangunan, yang kemudian dikenal istilah *investment in human capital*. Konsep tersebut pada intinya menganggap manusia adalah bentuk modal (Hasan & Azis, 2011).

c) Indeks Daya Beli

Untuk mengukur standar hidup manusia digunakanlah indeks daya beli, untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai kegiatan produksi indikator ini dipengaruhi oleh pengetahuan serta peluang sehingga menghasilkan output berupa barang maupun jasa sebagai pendapatan. Tingkat daya beli merupakan gambaran dari pengeluaran per kapita

masyarakat dan komponennya menjadi salah satu alat yang digunakan untuk melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah.

Menurut Adelman dan Morris (Riyan et al., 2019) ada delapan sebab munculnya ketidakmerataan distribusi pendapatan: (1) pertumbuhan penduduk tinggi akan memicu penurunan pendapatan perkapita, (2) inflasi ketika uang bertambah namun tidak diikuti secara proposional oleh penambahan produksi barang-barang, (3) ketidakmerataan pembangunan antar daerah, (4) investasi yang banyak dalam proyek-proyek yang dapat modal, (5) rendahnya mobilitas sosial, (6) pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang hasil industri, (7) buruknya nilai tukar/term of trade bagi negara yang masih berkembang dalam perdagangan dengan negara maju.

Rumah tangga yang menerima pendapatan besar dapat menandakan kesejahteraan suatu masyarakat. Pengeluaran makanan dan non makanan di dalam rumah tangga dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun di tiap daerah harganya berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan yang berbeda antar provinsi khususnya dari segi ekonomi. Konsumsi makanan dan non makanan dalam distribusi pengeluaran per kapita sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat/daya beli (Riyan et al., 2019).

B. Pembangunan Wilayah

Dalam konteks pembangunan tidak lepas dari suatu wilayah. Perwilayahan adalah usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi dengan tujuan tertentu. Pembagian wilayah berdasarkan kriteria-kriteria seperti administratif, politik, ekonomi, sosial, kultur, fisis, geografi, dan sebagainya. Pemerataan pembangunan berhubungan erat dengan wilayah. Perwilayahan untuk perencanaan pembangunan wilayah di Indonesia bertujuan untuk: (a) Menyebarkan pembangunan agar dapat terhindar dari pemusatan kegiatan pembangunan yang berlebihan; (b) Keserasian dan koordinasi yang terjamin antara kegiatan pembangunan di tiap daerah; (c) Memberikan pengarahan kegiatan pembangunan.

Wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk kelembagaannya. Dengan demikian wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumber daya yang ada dalam suatu batasan geografis. Ada 3 (tiga) kategori dalam mengklasifikasikan konsep wilayah, yaitu (1) wilayah homogen; (2) wilayah nodal; (3) wilayah perencanaan. Glason (1974) mengklasifikasikan wilayah menjadi 3, yaitu:

- a. Wilayah formal adalah wilayah geografik yang seragam, seperti keadaan fisik, sosial dan politik.
- b. Wilayah fungsional adalah wilayah yang saling berhubungan antar bagian dalam wilayah tersebut.

c. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan ekonomi (Deersea, 2020).

Wilayah pembangunan adalah perwilayahan untuk tujuan pengembangan/pembangunan. Ada 5 (lima) kata kunci yang terkait dengan tujuan pembangunan, yaitu (1) pertumbuhan; (2) penguatan keterkaitan; (3) keberimbangan; (4) kemandirian; dan (5) keberlanjutan. Pembangunan merupakan upaya yang berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang humanistik.

Pembangunan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang terdiri dari aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah. Pembangunan telah banyak mengalami evolusi perubahan, mulai dari strategi pembangunan yang menekankan dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kesempatan kerja, pertumbuhan dan pemerataan, penekanan kebutuhan dasar, pertumbuhan dan lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan.

Secara umum, makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk menciptakan perubahan sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep dari pembangunan adalah perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang baik. Tolak ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, tapi

harus lebih dari itu dan disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran (Kartono & Nurcholis, 2016).

1. Indikator Pembangunan Wilayah

Pembangunan wilayah bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan wilayah, dan memajukan kehidupan masyarakat. Harapan setiap daerah di Indonesia yaitu pembangunan yang strategis dan berkualitas. Meningkatkan daya saing adalah tujuan pembangunan wilayah yang dilihat dari potensinya masing-masing. Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi: pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan angka kemiskinan dapat menggambarkan capaian kinerja pembangunan wilayah secara umum (Bappeda Prov Sulbar, 2015)

a) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai “kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, menurut Prof Simon Kuznets” (Wahab, 2019). Pertumbuhan ekonomi suatu proses yang mencerminkan aspek dinamis dari perekonomian tentang bagaimana perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Terdapat beberapa pertumbuhan di dalam ilmu ekonomi. Teori-teori pertumbuhan

ekonomi dikelompokkan menjadi 3 yaitu teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan neo-klasik, dan teori pertumbuhan ekonomi modern.

Sukirno dalam (Prihastuti, 2018) pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi menurut Arsyad dalam (Baeti, 2013) diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto/Produk Nasional Bruto tanpa melihat apakah naiknya lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Adapun definisi lain dari PDRB sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (unit) yang dihasilkan oleh unit ekonomi. Untuk melihat gambaran perkembangan aktivitas perekonomian suatu wilayah maka dibutuhkan pertumbuhan ekonominya. Todaro dalam (Prihastuti, 2018) menyampaikan komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara, sebagai berikut:

1. Akumulasi modal, meliputi investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal sumber daya manusia;
2. Pertumbuhan penduduk, yang berdampak akan memperbanyak angkatan kerja;

3. Kemajuan teknologi, cara baru untuk menangani cara lama dalam menyelesaikan pekerjaan.

b) Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan (Chalid & Yusuf, 2014). Jumlah pendapatan yang sedikit (kemiskinan) termasuk permasalahan standar hidup yang rendah, kesehatan dan pelayanan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat rendah, perumahan yang kurang layak singgah berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran. Tingkat standar hidup dalam suatu negara/daerah diukur dengan salah satunya Gross National Product (GNP) per kapita, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesejahteraan (Widodo et al., 2012)

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan yang disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif (Todaro & Smith, 2010). Kemiskinan absolut adalah tingkat kemiskinan dimana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat dipenuhi. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan kaitannya dengan tingkat rata-rata.

Tingkat kemiskinan mempunyai hubungan erat dengan nilai indeks pembangunan manusia. Itu dikarenakan kemiskinan dapat disebabkan oleh

langkahnya alat kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan (Chalid & Yusuf, 2014). Kemiskinan dapat mempengaruhi sumberdaya manusia karena masyarakat yang miskin tidak memikirkan pendidikan dan kesehatan, tetapi bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berhubungan dengan pendidikan yang tidak terpenuhi taraf hidup akan hilang dan menyebabkan pengangguran yang meningkat (Ningrum et al., 2020).

Menurut word bank dalam (Dewi et al., 2016) penyebab dari munculnya kemiskinan adalah pendapatan dan aset yang kurang (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, rumah, pakaian, tingkat kesehatan, dan pendidikan. Serta kurangnya lapangan pekerjaan yang erat kaitannya dengan kemiskinan dan pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai. Tolak ukur kemiskinan bukan hanya kurangnya kebutuhan pangan dan pendapatan rendah, akan tetapi melihat ketiga indikator tersebut adil di muka hukum dan sebagainya.

c) Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu persoalan yang banyak terjadi di suatu wilayah khususnya pada daerah berkembang. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 (dua) hari selama sepekan (Mahroji & Nurkhasanah, 2019). Ketika terjadi makroekonomi pengangguran menjadi salah satu penyebabnya karena secara langsung faktor tersebut yang mempengaruhi dan yang paling berat,

sebagian orang kehilangan pekerjaan berakibat turunnya standar kehidupan dan psikologis (Ningrum et al., 2020).

Menurut Sukirno dalam (Ningrum et al., 2020) pengangguran merupakan seseorang yang digolongkan dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari kerja tetapi belum mendapat pekerjaan yang diinginkannya. Selain itu, pengangguran di klasifikasikan berdasarkan cirinya yaitu: pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, setengah menganggur, dan pengangguran bermusim. Pada penelitian ini digunakan pengangguran terbuka yang berarti angkatan kerja yang belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan (Ningrum et al., 2020).

Hubungan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sangat erat sekali. Jika suatu masyarakat bekerja dapat dikategorikan berkecukupan atau memiliki kesejahteraan yang tinggi, pengangguran secara otomatis akan mengurangi kesejahteraan suatu masyarakat dan mempengaruhi indeks pembangunan manusia (Hendri et al., 2019).

Pengangguran juga merupakan kondisi sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia atau IPM. Ketenagakerjaan adalah sektor pembangunan yang sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia. Kemakmuran masyarakat tidak maksimal diakibatkan banyaknya pengangguran sedangkan tujuan akhir dari pembangunan adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Jika pengangguran di suatu daerah tinggi maka akan menghambat tujuan pembangunan, kurangnya pendapatan masyarakat

sehingga daya beli menurun. Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang tidak dapat tercukupi. Dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak sehingga kesejahteraan tidak terpenuhi (Baeti, 2013).

d) Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto adalah salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator dari PDRB dapat diperoleh dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat disuatu wilayah. Informasi dari kedua indikator tersebut dapat dijadikan sebagai acua untuk mengambil keputusan bagi para kepala daerah baik dari tingkat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan suatu daerah (Pratiwi, 2019).

Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB merupakan keseluruhan dari nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu dan didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut PDRB bisa dikaitkan sebagai jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu pada umumnya dalam waktu satu tahun.

Adapun komponen penggunaan poduk domestik regional bruto yaitu: a) *pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga*. Terdiri dari

pengeluaran ataupun pembelian barang baru, kecuali pembelian rumah, dan jasa-jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga penduduk suatu daerah, dikurangi dengan hasil penjualan hasil neto barang-barang bekas. b) *Pengeluaran konsumsi akhir lembaga swasta yang tidak mencari untung.* Dengan nilai outputnya yang meliputi pembelian (termasuk penerimaan transfer dalam bentuk natural) dari barang dan jasa, pembayaran upah dan gaji, penyusutan dan pajak tidak langsung neto yang dibayar lembaga ini, dikurangi penjuala barang dan jasa yang dihasilkan. (c) *pengeluaran konsumsi akhir pemerintah.* Besarnya hasil nilai barang yang dikonsumsi sendiri. Nilai dari jasa ini yaitu sebesar nilai produksi bruto yang terdiri dari pembelian barang dan jasa pembayaran belanja pegawai dan biaya penyusutan barang modal pemerintah, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah. Adapun kegiatan pemerintah seperti kegiatan administrasi umum dan pertahanan.

e) Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang terjadi secara umum di suatu daerah. Adanya ketimpangan yang terjadi disebabkan karena perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi pada masing-masing wilayah. Ketimpangan pembangunan daerah selalu muncul dan cenderung semakin melebar.

Ketimpangan yang paling sering dijadikan pembicaraan adalah ketimpangan ekonomi, akan terjadi pengaruh yang merugikan (*backwash*

effect) dan pengaruh yang menguntungkan (*spread effect*) ketika perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan terhadap pertumbuhan daerah, yang mengakibatkan ketidakseimbangan.

Pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah satu dengan daerah lainnya sering terjadi ketimpangan, karena adanya perbedaan dalam sumber daya alam dan proses pembangunan sejak awal. Ketimpangan terjadi pada tahap awal pembangunan, yang kemudian terjadi semakin lebar dan membesar dan hanya terpusat pada daerah tertentu. Mubyarto dalam (Islami & SBM, 2018) membedakan ketimpangan menjadi 3 kategori:

1. Ketimpangan antar sektor, yaitu sektor industri dan pertanian;
2. Ketimpangan antar daerah, ketimpangan ini terjadi akibat perbedaan sumber daya yang dimiliki;
3. Ketimpangan antar golongan ekonomi. Ketimpangan ini terjadi dalam sistem perekonomian liberal atau kapitalis.

C. Penelitian Terdahulu

Ryan Ezkiriando dan Muhammad Findi A (2013) melakukan penelitian terkait analisis keterkaitan antara indeks pembangunan manusia dan PDRB per kapita di Indonesia. Penelitian ini menganalisis hubungan dua arah antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap 33 Provinsi di Indonesia periode 2006-2011. Penelitian ini menggunakan data panel dengan metode *two stage least square* (2SLS).

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara indeks pembangunan manusia dan PDRB per kapita, ketika rata-rata lama sekolah, belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan, total pengeluaran pemerintah, serta distribusi pendapatan merupakan variabel penting yang menjelaskan kekuatan hubungan antara pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi.

Soemartini (2016) melakukan penelitian dengan judul penerapan metode two stage least square pada model persamaan simultan dalam memprediksi PDRB dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000-2013. Data yang digunakan Soemartini yaitu PDB, pertumbuhan ekonomi, ekspor, impor, tingkat pengangguran, dan kepadatan penduduk. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu secara signifikan pertumbuhan ekonomi dengan variabelnya mempengaruhi PDB sedangkan PDB juga dengan variabelnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Rokhana Dwi Becti, dkk (2014) melakukan penelitian mengenai model persamaan simultan pada analisis hubungan kemiskinan dan PDRB. Indikator umum pada PDRB yaitu pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sedangkan kemiskinan menjadi faktor pengukuran kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisis *two stage least square* (2SLS) untuk mendapatkan model simultan antara PDRB dan kemiskinan. Data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 33 Provinsi di Indonesia tahun 2010. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah variabel

yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB adalah kemiskinan, ekspor, impor. Sementara itu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan adalah jumlah penduduk. Pada model simultan memberikan hasil $\alpha = 5\%$ hasilnya tidak ada hubungan simultan antara PDRB dan kemiskinan. Namun $\alpha = 25\%$ hasilnya terdapat hubungan simultan antara PDRB dan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Rasyid Arba, dkk (2021) dengan judul aplikasi model persamaan simultan data panel dinamis untuk pemodelan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2010-2018 dengan metode *Generalized Method Of Moment (GMM)* Arelanno-Bond. Hasil dari penelitian ini pada persamaan PDRB variabel yang berpengaruh signifikan adalah variabel IPM dan pengeluaran pemerintah daerah, sedangkan pada model persamaan IPM variabel yang berpengaruh signifikan adalah variabel PDRB dan lama bersekolah.

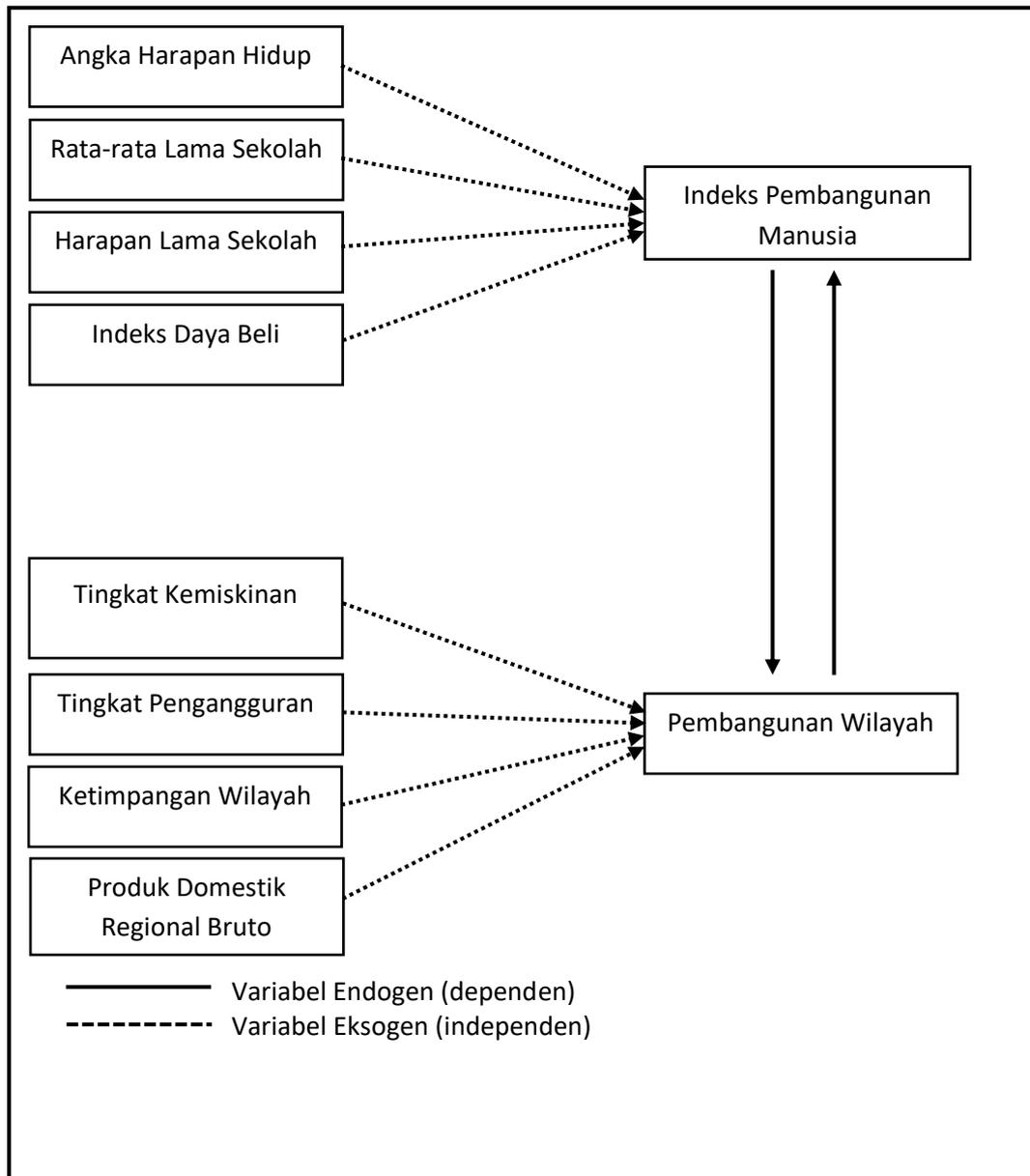
Merang Kahang, dkk (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur. Alat yang digunakan untuk mengolah data uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS 22 dan analisis model pada penelitian ini regresi linear berganda. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pengeluaran pemerintah

pendidikan secara signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Sektor pengeluaran kesehatan pemerintah tidak signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia.

Putri Ramhadhoni, dkk (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh PDRB daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah sebagai alat pengambil kebijakan untuk pereconomian Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur (path analysis). Hasil dari penelitian ini PDRB atas harga konstan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. PDRB atas harga berlaku tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka.

D. Kerangka Pikir

Indeks pembangunan manusia merupakan tolak ukur bagi suatu daerah untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan dan kesejahteraan di wilayahnya. Ada 4 dimensi yang menjadi tolak ukur indeks pembangunan manusia: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli. Sedangkan parameter yang dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, ketimpangan wilayah, PDRB.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dan Pembangunan Manusia

E. Hipotesis Penelitian

H₁ = Angka Harapan Hidup Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat

H₂ = Rata-rata Lama Sekolah Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat

- H₃ = Harapan Lama Sekolah Berpengaruh Terhadap Indeks
Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat
- H₄ = Indeks Daya Beli Berpengaruh Terhadap Indeks
Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat
- H₅ = Tingkat Kemiskinan Berpengaruh Terhadap Pembangunan
Wilayah di Provinsi Sulawesi Barat
- H₆ = Tingkat Pengangguran Berpengaruh Terhadap Pembangunan
Wilayah di Provinsi Sulawesi Barat
- H₇ = Ketimpangan Wilayah Berpengaruh Terhadap Pembangunan
Wilayah di Provinsi Sulawesi Barat
- H₈ = Produk Domestik Regional Bruto Berpengaruh Terhadap
Pembangunan Wilayah di Provinsi Sulawesi Barat
- H₉ = Indeks Pembangunan Manusia dan Pembangunan Wilayah
terdapat hubungan yang simultan di Provinsi Sulawesi Barat